

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai simpulan yang menggambarkan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan-rumusan penelitian yang telah diajukan. selanjutnya implikasi perihal temuan oleh peneliti, baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Dan terakhir simpulan serta implikasi yang dipaparkan oleh peneliti akan menjadi dasar untuk menjadi rekomendasi bagi unsur para pembuat kebijakan, para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, serta kepada peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

5.1 Simpulan

Sebagaimana data-data yang ditemukan dan dibahas oleh peneliti pada bab sebelumnya mengenai Kebijakan Pendanaan Olahraga pada APBD Jawa Barat terhadap Capaian Rencana Strategis Dispora Jabar 2019-2021, peneliti dapat menyampaikan hal-hal sebagaimana berikut :

- 1) Didalam pelaksanaan Kebijakan pendanaan APBD Jawa Barat untuk mencapai target kinerja Rencana Strategis event Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan pendanaan didalam APBD pada tahun yang sama. Selanjutnya Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Jawa Barat, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian strategis tersebut diantaranya pelaksanaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (PPLP) sebagai wadah bagi para atlet pelajar bertanding, serta event-event yang mendukung bagi perkembangan atlet baik yang diselenggarakan maupun diikuti seperti POPDA, POPWILDA, POPWILNAS, Kejurnas PPLP, Try In dan Try Out PPLP, Adapun capaian kinerja Rencana Strategis Event POPNAS dapat terpenuhi targetnya yaitu menjadi Juara Umum. Artinya penggunaan Pendanaan olahraga melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian Rencana Strategis Event POPNAS telah dilaksanakan dengan tepat guna dan baik, selanjutnya sebagai keberlanjutan pembinaan olahraga prestasi pelajar menuju elite sport, penulis

menyandingkan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dispora Jabar pada tahun 2019-2021 dengan pendekatan *The Sports Policy Factors Leading To International Sporting Succes (SPLISS)*, pilar kebijakan yang telah dipenuhi pada rencana strategis POPNAS adalah sebanyak delapan pilar, dan yang belum ditemukan data pada program kegiatan yang diselenggarakan adalah mengenai pilar ke sembilan yaitu *Science Research And Innovation*.

- 2) Didalam pelaksanaan Kebijakan pendanaan APBD Jawa Barat untuk mencapai target kinerja Rencana Strategis event Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan pendanaan didalam APBD untuk tahun yang sama. Selanjutnya Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Jawa Barat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian strategis tersebut, diantaranya melaksanakan event Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) pada tahun 2018, dan training center pada tahun 2019, namun apabila melihat hasil dari PEPARPENAS nampaknya masih dirasa kurang untuk pelaksanaan kegiatan pendukung, apabila hanya mengandalkan PEPARPEDA saja yang dilaksanakan hanya dua tahun sekali. Hasil yang didapat untuk PEPARPENAS adalah Juara ke 5 pada tahun 2019. Sehingga kesimpulan yang diambil oleh penulis adalah perencanaan kegiatan yang mendukung capaian rencana strategis PEPARPENAS belum maksimal. Apabila dibandingkan dengan *The Sports Policy Factors Leading To International Sporting Succes (SPLISS)* maka Pilar kebijakan *Training Facilities, Coaching Provision, dan Scientific Research & Innovation* belum dilaksanakan baik oleh Dispora Jabar maupun NPCI Jawa Barat. Ketiga pilar ini berkaitan erat dengan peningkatan kualitas atlet. Disamping itu juga untuk pilar kebijakan nomor delapan tentang *National dan International Competition*, meskipun kegiatan event nya diselenggarakan namun belum memberikan dampak maksimal terhadap prestasi pelajar Jawa Barat di tingkat nasional.
- 3) Didalam pelaksanaan Kebijakan pendanaan APBD Jawa Barat untuk mencapai target kinerja Rencana Strategis event Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan Hibah APBD kepada KONI Jawa Barat dari mulai tahun 2019 untuk tahap persiapan Pelatda

PON dan BK PON serta tahun 2021 untuk pelaksanaan event. Selanjutnya KONI Jawa Barat melaksanakan perencanaan berupa Pelatda, dan khusus bagi 7 cabang unggulan mendatangkan pelatih dari Korea Selatan, disamping itu induk cabang melaksanakan Try in dan Try Out, dan juga Kejurnas, ditambah Dispora Jawa Barat melaksanakan kegiatan yang mendukung capaian strategis tersebut, diantaranya adalah Piala Gubernur Tk. Senior. Sama halnya pada POPNAS, peneliti belum menemukan data mengenai pilar kesembilan yaitu *Science Research And Innovation*, hal ini diperkuat oleh wawancara informan yang menyampaikan “yang harus ditingkatkan KONI itu dari sisi penelitian dan penggunaan IPTEK harusnya adalah peningkatan kerja sama dengan perguruan diri dari menggunakan fasilitas lalu ada timbal balik yang berkaitan dengan transfer ilmu IPTEK, kemudian menggunakan peralatan peralatan yang ada di sana”. Dan pada tahun 2021, Jawa Barat berhasil mencapai target yaitu Juara Umum PON tahun 2021 sehingga kesimpulan dari kebijakan Pendanaan Olahraga pada APBD Jabar untuk mencapai Rencana Strategis event PON pada Tahun 2021 bisa dikatakan sudah tepat eksekusi pelaksanaannya.

- 4) Didalam pelaksanaan Kebijakan pendanaan APBD Jawa Barat untuk mencapai target kinerja Rencana Strategis event Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan Hibah APBD kepada NPCI. Sama halnya dengan PON, peneliti menemukan hanya satu pilar saja yang belum dilaksanakan, yaitu pilar ke Sembilan, *Science Research And Innovation*. Pada event tersebut, kontingen Jawa Barat meraih juara kedua dari target juara pertama, berdasarkan hasil telaahan, semua tahapan dalam Logical Framework sudah terpenuhi, hanya perlu dilakukan pendekatan metode evaluasi yang berbeda untuk melihat ketidaktercapaian target tersebut.
- 5) Selanjutnya pelaksanaan Kebijakan pendanaan APBD Jawa Barat untuk mencapai target kinerja Rencana Strategis meningkatnya Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO) tahun 2019-2021, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan didalam APBD di tahun yang sama. Selanjutnya Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Jawa Barat melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang mendukung capaian strategis tersebut, yaitu melaksanakan kegiatan yang menstimulus Masyarakat untuk berolahraga, diantaranya Gebyar Segar Bugar, Festival Silat, Invitasi Ortrad, Pengerahan Tenaga SP3OR Jawa Barat, Minggu Bergerak oleh tenaga SP3OR, disamping kegiatan pendukung seperti pelatihan-pelatihan bagi tenaga keolahragaan. Capaian kinerja yang dihasilkan adalah Partisipasi Masyarakat Jawa Barat berolahraga pada tahun 2019 sebesar 51,7 % dari target 52% dan dinyatakan target tercapai, selanjutnya tahun 2020 sebesar 47,3% dari target 54% dan tahun 2021 sebesar 49,7%. Dari target 54%. Di dua tahun terakhir, target APMO tidak terpenuhi dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan aktivitas di ruang publik dan larangan berkerumun. maka dari itu hanya tahun 2019 saja kebijakan pendanaan olahraga dapat digunakan dengan tepat sasaran, di tahun covid, anggaran terkena refocusing.

- 6) Kebijakan pendanaan urusan kewenangan pemerintah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana Bidang Olahraga termasuk didalam Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar yang Mandatory Spending tidak diatur oleh undang-undang sehingga anggaran bidang olahraga tidak memiliki persentase minimal anggaran tiap tahunnya. Hal ini berbeda dengan urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar yang mandatory spending nya diatur oleh undang-undang, seperti Pendidikan anggarannya 20% dari total APBN/APBD, Kesehatan 10%, Infrastruktur 25%.
- 7) Sistem pemerintahan nasional saat ini menganut Otonomi Daerah dengan pembagian urusan pemerintahan, sehingga saat ini masing-masing pemimpin daerah mempunyai hak otonomi untuk dapat memprioritaskan kebutuhan pembangunan sesuai kebutuhan daerahnya, apabila dicermati lebih mendalam, kondisi ini bisa menjadi hal positif dalam kebijakan pendanaan olahraga di Jawa Barat, dengan perencanaan event-event yang diselenggarakan ditingkat provinsi, maka Kab/kota di Jawa Barat akan akan melaksanakan pembinaan bagi para atletnya untuk persiapan bertanding, dan untuk mempersiapkan hal tersebut diperlukan pendanaan. Lebih jauh lagi bisa dibayangkan jumlah pendanaan yang dianggarkan dari 27 Kab/Kota di Jawa Barat apabila semua digabungkan maka nilainya menjadi sangat besar dengan kebermanfaat

sinergis yang didapatkan baik oleh Kab/Kota dan Provinsi Jawa Barat apabila status Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bagi Bidang Olahraga tidak bisa dirubah dalam jangka waktu dekat.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian yang telah dicapai pada penelitian ini tentunya diharapkan dapat berimplikasi terhadap kepentingan bersama. Implikasi yang diharapkan tentunya sesuai dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Melalui penelitian ini terdapat implikasi dari segi teoritis dan implikasi dari segi praktis, sebagai berikut:

- 1) Penelitian Studi Kasus Kebijakan Pendanaan Olahraga pada APBD Pemerintah saat ini belum terlalu menjadi isu hangat untuk dipaparkan dan dikaji oleh para mahasiswa, sehingga peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi insan olahraga untuk memahami alur kebijakan olahraga bermuara dan dijalankan. Selanjutnya dapat semakin banyak penelitian serupa untuk mengembangkan hasil dari penelitian ini untuk kemajuan olahraga yang semakin baik.
- 2) Teori Kebijakan yang mempengaruhi kesuksesan internasional yang dimasukan didalam penelitian ini semoga dapat memberikan masukan positif terkait bagaimana implementasi pendanaan yang dapat lebih terarah apabila mempunyai panduan, dalam rangka peningkatan olahraga prestasi di daerah. Bahkan dapat lebih baik lagi apabila penelitian mengenai implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan bagi Olahraga Pelajar, Disabilitas, Senior dan Rekreasi secara mendalam sudah dilakukan.
- 3) Lahirnya inovasi-inovasi kebijakan olahraga melalui penelitian yang dilakukan secara ilmiah melalui para mahasiswa sebagai bentuk sumbangsih pemikiran bagi kemajuan bangsa dan negara yang dapat dipertanggung jawabkan.

5.3 Rekomendasi

Bagian ini memaparkan rekomendasi sesuai dengan kesimpulan dan implikasi penelitian terkait dengan Kebijakan Pendanaan Olahraga. Rekomendasi ini ditujukan kepada beberapa pihak dalam rangka memajukan bidang olahraga

sebagai bidang yang dapat memberikan manfaat kepada Negara Indonesia, beberapa rekomendasi yang disampaikan adalah :

5.3.1 Bagi Pemangku Kebijakan Olahraga

- 1) Saat ini kebijakan pendanaan untuk olahraga berada pada Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar yang mandatory spendingnya tidak diatur dalam Undang-Undang, sebagai upaya jangka dekat yang bisa dilaksanakan untuk pengembangan Olahraga Prestasi Pelajar dan Pelajar Disabilitas sebagaimana amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah, perlu dilaksanakan kolaborasi dan sinergitas perencanaan dan anggaran bersama antara perangkat daerah yang membidangi pendidikan beserta organisasi mitra. Selanjutnya Amanat Perda Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 menyampaikan bahwa tujuan olahraga rekreasi adalah untuk menjaga kesehatan, bagi pengembangan olahraga rekreasi yang mencakup target olahraga pada masyarakat yang lebih luas, kebutuhan anggaran yang besar tentu tidak akan dapat terpenuhi hanya mengandalkan APBD yang membidangi Olahraga semata, maka upaya yang bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat diantaranya adalah kolaborasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, disamping itu pemanfaatan dari adanya perkumpulan/sanggar di tingkat kecamatan sebagai sarana mengelola, mengembangkan serta melaksanakan olahraga di daerah masing-masing sehingga setiap masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan olahraga didaerahnya dapat membantu memaksimalkan tujuan capaian strategis di tingkat Grassroot.
- 2) Saat ini Development Through Sport dengan luaran Development societal outcomes telah menjadi isu hangat bagi negara-negara di internasional, mereka menyadari bahwa olahraga memiliki makna luas yang bertujuan untuk pengembangan pribadi melalui *physical education curriculum* (kurikulum pendidikan jasmani sebagai mata pelajaran) untuk *life long activity* (aktivitas sepanjang hayat), kemudian *out of school ours activities* (aktivitas di luar jam pelajaran sekolah) untuk *life long participations* (partisipasi sepanjang hayat), dan *competitive school sports* (kompetisi olahraga sekolah) untuk talent development (pengembangan bakat) yang manfaatnya akan sangat terasa bagi negara. Maka dari itu kiranya rancangan

kebijakan pembangunan olahraga serupa dapat disusun dan dibuat peraturan yang menaunginya dan berlaku untuk perangkat daerah yang memiliki output serupa seperti perangkat daerah yang membidangi kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lain agar tercipta kolaborasi perencanaan dan pendanaan. Sehingga secara tidak langsung urusan Olahraga tidak lagi menjadi urusan wajib non pelayanan dasar dikarenakan dikotomi urusan.

- 3) Perlunya Perangkat Daerah untuk melaksanakan evaluasi kebijakan dalam penyusunan kegiatan, agar pendanaan olahraga bisa lebih tepat guna untuk kepentingan masyarakat umum.
- 4) Dari hasil telaahan pelaksanaan kegiatan olahraga melalui *The Sports Policy Factors Leading To International Sporting Success (SPLISS)*, sampai dengan tahun 2021 belum ditemukan data mengenai *Science Research And Innovation*. Kiranya perangkat daerah yang membidangi olahraga dapat berkolaborasi dengan unsur akademik dan science untuk pengembangan *Science Research And Innovation* bagi pengembangan keolahragaa di Jawa Barat.

5.3.2 Bagi Akademisi Olahraga

- 1) Akademisi olahraga saat ini dibutuhkan dalam memberikan masukan-masukan terkait kebijakan olahraga, maka seyogyanya kebijakan olahraga bisa menjadi perhatian lebih dari para akademisi untuk dikembangkan di lingkungan Universitas
- 2) Akademisi olahraga dapat terus berupaya membantu Pemerintah dalam memajukan olahraga dengan memberikan masukan terutama pada kondisi lapangan yang aktual dan faktual berdasarkan rujukan komprehensif terkait dengan perkembangan olahraga di negara-negara maju yang tentunya bisa diadaptasi di Indonesia khususnya di Jawa Barat;

5.3.3 Bagi Penelitian Selanjutnya

- 1) Penelitian ini menitikberatkan pada penyajian data pembangunan olahraga dari aspek pendanaan olahraga periode 2019-2021 oleh pemerintah Jawa Barat, peneliti berharap dikemudian hari ada penelitian lanjutan dari sudut pandang lainnya agar dapat hadir inovasi-inovasi kebijakan olahraga dikemudian hari.